

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai respons terhadap meningkatnya volume dan keragaman sampah, kebutuhan penguatan koordinasi lintas sektor, kelembagaan pengelolaan sampah, serta partisipasi masyarakat. Perubahan diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperkuat tata kelola yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong penerapan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan.

Materi pokok mengubah ketentuan mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, kewenangan Pemerintah Daerah, tugas dan kewenangan Pemerintah Desa, kewajiban pelaku usaha dan masyarakat, pemrosesan akhir sampah, pengelolaan sampah spesifik, larangan, lembaga pengelola sampah, sistem informasi, serta pembinaan dan pengawasan. Pengaturan menegaskan keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media massa; penguatan bank sampah unit; tanggung jawab produsen; pengelolaan sampah elektronik; larangan penggunaan plastik sekali pakai pada fasilitas publik; serta sistem informasi pengelolaan sampah terpadu berbasis digital.

Rancangan ini juga mengatur evaluasi berkala terhadap kapasitas dan kondisi tempat pemrosesan akhir, pembentukan Tim Pembina Pengelolaan Sampah, serta fasilitasi terhadap lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan, mengurangi dampak lingkungan, dan memberi nilai tambah ekonomi melalui pengelolaan sampah berbasis kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat.

Catatan: -

ABSTRACT

KEBUMEN REGENCY, DRAFT REGIONAL REGULATION ON THE AMENDMENT TO KEBUMEN REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 13 OF 2023 ON WASTE MANAGEMENT.

This Draft Regional Regulation is prepared in response to increasing waste volume and diversity, the need to strengthen cross-sector coordination, waste-management institutions, and community participation. The amendment aims to align regional policy with prevailing laws and regulations, strengthen integrated and sustainable governance, and promote environmentally friendly waste-management technology.

The main provisions amend regulations on waste-management policies and strategies, the authorities of the Regional Government, the duties and authorities of village governments, obligations of businesses and the community, final waste processing, specific waste management, prohibitions, waste-management institutions, information systems, and guidance and supervision. The Draft emphasises the involvement of businesses, higher education institutions, communities, and mass media; strengthening unit waste banks; producer responsibility; electronic-waste management; prohibition of single-use plastics in public facilities; and an integrated digital waste-management information system.

The Draft also regulates periodic evaluation of the capacity and condition of final processing sites, the establishment of a Waste Management Guidance Team, and facilitation for community-established waste-management institutions. These provisions are intended to improve waste services, reduce environmental impacts, and create economic value through collaborative and community-empowerment-based waste management.

Note: -